

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA PADA DESA TALANG
PANGERAN ULU KECAMATAN
PEMULUTAN BARAT**

SKRIPSI



**Nama : Muhammad Yahya
NIM : 222013059**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA PADA DESA TALANG
PANGERAN ULU KECAMATAN
PEMULUTAN BARAT**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh gelar sarjana**



**Nama : Muhammad Yahya
Nim : 222013059**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Akuntabilitas Dan Tranparansi
Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi
Dana Desa Pada Desa Talang Pangeran Ulu
Kecamatan Pemulutan Barat.
Nama : Muhammad Yahya
NIM : 22 2013 059
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Study : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal,Februari 2019

Pembimbing I

Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Pembimbing II

Muhammad Fahmi, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0029097804/119727

Mengetahui,
Dekan

o.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yahya

NIM : 222013059

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada yang merupakan menjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari telah terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2019

Penulis


Muhammad Yahya

ABSTRAK

Yahya, Muhammad/222013059. *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemuluttan Barat*. Skripsi, Program Studi Akuntansi, Sarjana Degree (SI), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pembimbing: (1) Betri Sirajudin, SE., M.Si., AK., CA, (2) Muhammad Fahmi, S.E., M.Si.

Kata kunci : Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

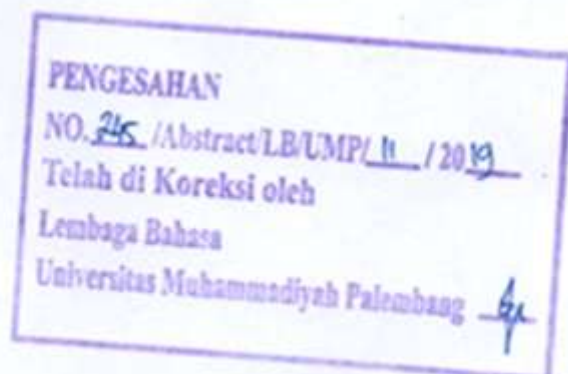
Judul dari skripsi ini adalah “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan pada desa Talang Pangeran Ulu. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2015-2016 persentasinya 99,9% sedangkan pada tahun 2017 persentasinya 91,7%. Ini berarti bahwa Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Alokasi Dana Desa tidak terealisasi dengan baik.

Abstract

Muhammad Yahya/222013059/2019/An Analysis of Accountability and Transparency of Village Governments in Managing Village Fund Allocation in Talang Pangeran Ulu Village Kecamatan Pemulutan Barat.

The purpose of this study was to determine the accountability and transparency of the village government in village fund allocation. This research was conducted in the village of Talang Pangeran Ulu. The technique of collecting data used interviews and documentation. Based on the results of the study, it was shown that accountability and transparency in the management of village fund allocations in 2015-2016 were 99.9% while in 2017 the percentage was 91.7%. This meant that the accountability and transparency of the Village Government in the Village Fund Allocation was not well realized.

Keywords: Government Accountability and Transparency in Management of Village Fund Allocatio.



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang motivator, junjungan umat islam, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. sehingga penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Toharo dan Ibuku Soleha, Abangku Nawawi dan Kakak Perempuan Susanti, Wiwin, Hety dan Windiawati S.Pd serta seluruh keluarga besar serta saudara seperjuanganku yang dipertemukan karena Allah, yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan inspirasi serta dukungan agar selalu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pemimbingku Bapak Betri Sirajuddin, S.E., A.k., M.Si., CA dan Bapak Muhammad Fahmi, S.E.M.Si yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE.,M.Si.,AK.,CA dan Ibu Nina Sabrina,S.E.,M.Si selaku ketua Program dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak H.M.Basyaruddin R, S.E.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Pembimbing Akademik paket 12 Angkatan 2013
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak/Ibu Pemerintah Desa Talang Pangeran Ulu.
7. Sahabat-sahabat paket 12
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukanya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN /COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
1. Akuntansi Pemerintah	9
2. Alokasi Dana Desa.....	10
3. Pengertian Pemerintahan Desa.....	14
4. Pengertian Dana Desa	15
a. Kedudukan dan Fungsi Dana Desa	15
b. Tim Pengelola Dana Desa.....	16

c. Pengelolaan Dana Desa	18
5. Akuntabilitas	21
a. Pengertian Akuntabilitas	21
b. Macam-macam Akuntabilitas	22
6. Transparansi	23
7. Belanja Desa.....	24
B. Penelitian Sebelumnya	27
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Operasionalisasi Variabel.....	30
D. Data Yang Diperlukan.....	31
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Metode Analisis dan Teknik Analisis	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Alokasi Dana Desa	6
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	30
Tabel IV.1 Daftar Alokasi Dana Desa Pada Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir	53
Tabel IV.2 Hasil Penelitian Desa Pada Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat Kab. Ogan Ilir	54
Tabel IV.3 Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa .	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi	40
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negarawan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di pedesaan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari.

Menurut Virgie, dkk (2013: 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga. Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai

lembagater depan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting.

Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung padaseberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan,fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannyadalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntanbilitas yang tinggi.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemeritahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.*Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjagakeseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, danmasyarakat.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap

klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Solekhan, 2012: 15).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011:223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa.

Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip *good governance* adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa paling sedikit 10%.

Menurut Septian (2016: 94) dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan pembiayaan, yang memiliki hubungan dengan ADD, sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan ADD kepada setiap desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. ADD diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari danaperimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa (Dura, 2016: 28). Dengan adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah. Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung

secarasarad, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa
Di Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2015	1.374.000.000.00	1.373.374.423.92	99.9%
2016	1.350.000.000.00	1.349.573.290.50	99.9%
2017	1.215.309.000.00	1.115.319.000.00	91.7%

Sumber : Kantor Kecamatan Pemulutan Barat 2019

Berdasarkan tabel 1.1 Menunjukkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Dalam pengalokasian dana desa tersebut diperlukan badan permusyawaratan desa (BPDesa), sebagai pengawasan agar dana tersebut tersalurkan untuk pembangunan, Desa Talang Pangeran ulu masih minim pengawasan pengelolaan keuangan terhadap penggunaan anggaran. Fakta lapangan menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan tidak jelas.

Masalah lainnya akuntabilitas (Pertanggungjawaban) yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan sampai saat ini juga belum ditunjang dengan sistem dan prosedur yang memadai. di Desa Talang Pangeran ulu Kecamatan Pemulutan Barat belum menerapkan dan membuat semua laporan yang menjadi peraturan dalam penyusunan laporan keuangan desa. Dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya belum dapat di pertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Program-program yang direncanakan pun masih banyak yang belum terealisasikan.

Tabel 1.2
Survei Pendahuluan

Nama Warga	Fenomena yang diterima
Bapak M. Teguh	Akuntabilitas kejujuran dan hukum di Desa Talang Pangeran Ulu belum di jalankan dengan baik.
Bapak Ibrahim	Belum efektif dan efesienya pola kerja di Desa Pangeran banyaknya kegiatan pembangunan yang belum terlaksana.
Ibu Sundari	Pencatatan keungan Desa di Desa Talang Pangeran belum melaksanakan tahap ini dengan baik.
Bapak Sekdes Taufik Hidayat	Pada tahap ini Kepala Desa Talang Pangeran bahwa dalam merencanakan sesuatu kami selalu mempertimbangkan kebijakan apa yang kami ambil khususnya untuk program pelaporan tidak pernah terjadi keterlambatan.
Bapak Yanto	Pada tahap pertanggungjawaban ini kantor desa Talang Pangeran tidak memaparkan secara luas anggaran biaya atas pembangunan desa

Sumber. Penulis, 2019

Desa Talang Pangeran ulu juga belum banyak melakukan perubahan pembangunan. Tingkat pembangunan didesa Pangeran ulu juga masih belum banyak yang berjalan seperti pembangunan jalan setapak masih banyaknya jalan yang rusak dan belum diperbaiki, adanya anggaran yang dikeluarkan mengenai pembuatan atau pembangunan taman, pelatihan kelompok nelayan dan pengadaan hewan ternak.

Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (Siagian, 1985) Dari berbagai

permasalahan dan latar belakang yang dihadapi pemerintah desa di desa Talang Pangeran ulu kecamatan Pemulutan Barat tersebut,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.**

C. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah diuraikan pada perumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam alokasi dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik, yaitu mengenai pentingnya prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya Pada Desa Talang Pangeran ulu Kecamatan Pemulutan Barat

2. Bagi Pemerintah Desa

Bagi aparatur desa diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan dana desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas, pemerintah desa, alokasi dana desa, sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya desa Talang Pangeran ulu kecamatan Pemulutan Barat.

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Irma, Ade. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. E-Journal Katalogis*, Volum 3 Nomor 1, Januari 2015.
- Bukhari. 2012, Sistem pemerintahan desa. <http://www.materibelajar.id/2016/03/sistem-pemerintahan-desa-di-negara.html>
- Ghazali, I. (2001). *Pokok akuntansi pemerintahan*. Yogyakarta: BPF.
- Mahmudi. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit CV Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit CV Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan, D. (2009). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72.2005. *Tentang Sumber Kedudukan Keuangan Desa*
- Permendagri Nomor 37.2007. *Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa*.
- Permendagri Nomor 113.2014. *Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa*
- PP Nomor 72 Tahun 2005. *Tentang Wewenang Kepala Desa*.
- Septian, D. (2016). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Kampung Banjar Semina Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tahun 2015. *Jom Fisip Vol. 3No. 2* hal 92-101. <http://www.materibelajar.id/2016/03/sistem-pemerintahan-desa-di-negara.html>
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh: Read
- Sanusi, D.P dan Djumlani, A. (2014). Implementasi kebijakan alokasi dana desa(ADD)didesa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. *Volume2 Nomor 3*, 2014. <http://www.portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2267>

- Sujarweni, V Wiratna.(2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Desa*
- Ulum,I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* .Malang : UMMPRESS.
- Valentina,dkk.(2015).*Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan TegalSari*.Banyuwangi
- Virgie K.A., Delawillia dan Supranoto. (2013). Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume12 Nomor 2, Januari 2013* hal 94-103/[https://www.scribd.com/document/363757871/jurnal-
implementasi-alokasi-dana-desa](https://www.scribd.com/document/363757871/jurnal-implementasi-alokasi-dana-desa)
- Waluyo. (2017). *Manajemen Publik (Konsep,Aplikasi, Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV Mandar Maju